

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

**A. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya dilakukan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harmonisasi dan *streamlining* berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang mampu mendorong kinerja organisasi, perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang jelas dan terinci, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun road map reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut meliputi 8 area perubahan yaitu (1) mental aparatur, (2) pengawasan, (3) akuntabilitas, (4) kelembagaan, (5) tatalaksana, (6) sumber daya manusia aparatur sipil negara, (7) perundang-undangan dan (8) pelayanan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu program unggulan yaitu "Reformasi Birokrasi yang berbasis kompetensi" sebagai komitmen untuk mewujudkan perubahan. Langkah-langkah perubahan tersebut diawali dari area perubahan mental aparatur yang selanjutnya diharapkan dapat membawa perubahan pada 7 area yang lain. Dengan reformasi birokrasi ini diharapkan mampu mewujudnya *good governance* (pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Filosofi Kegiatan

Filosofi Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien, terukur dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2015;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

#### 4. Tujuan

- a. Mewujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan berdaya saing.
- b. Mempercepat pencapaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c. Mewujudkan Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.

#### 5. Manfaat

- a. Meningkatkan kinerja OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- b. Mendorong ASN untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan-perubahan atau terobosan yang inovatif.

#### 6. Sasaran

- a. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peningkatan kualitas kinerja ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

#### 7. Target Kinerja

- a. Terselenggaranya rapat koordinasi capaian rencana aksi implementasi reformasi birokrasi pada SKPD Provinsi Jawa Tengah.
- b. Terselenggaranya rapat koordinasi pengumpulan dokumen bukti area perubahan reformasi birokrasi dan evaluasi reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah.
- c. Terselenggaranya rapat koordinasi implementasi reformasi birokrasi bagi OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- d. Terselenggaranya rapat persiapan Pembinaan, monitoring, evaluasi reformasi birokrasi pada OPD dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- e. Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- f. Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penerapan Budaya Kerja pada Kabupaten/Kota.
- g. Terselenggaranya Fasilitasi, Pembinaan, monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD Provinsi Jawa Tengah.
- h. Fasilitasi, Pembinaan, monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- i. Konsultasi reformasi birokrasi ke Pusat dan study orientasi ke Provinsi lain.

8. Hasil :

1. Peningkatan OPD/Biro Setda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan baik.
2. Hasil evaluasi reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah bernilai baik dan meningkat.

**B. PELAKSANAAN**

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah adalah Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

3. Bentuk Kegiatan

- a. Rapat koordinasi capaian rencana aksi implementasi reformasi birokrasi pada SKPD.
- b. Rapat koordinasi pengumpulan dokumen bukti area perubahan reformasi birokrasi dan persiapan evaluasi RB Prov. Jateng.
- c. Rapat koordinasi implementasi reformasi birokrasi bagi OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- d. Rapat persiapan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB pada OPD dan Kab/Kota se-Prov. Jateng.
- e. Pembinaan dan evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada Kab/Kota.
- f. Pembinaan dan evaluasi penerapan Budaya Kerja pada Kab/Kota.
- g. Fasilitasi, Pembinaan, monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD Prov. Jateng dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- h. Konsultasi reformasi birokrasi ke Pusat dan study orientasi ke Provinsi lain.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Lokasi Kegiatan

Provinsi Jawa Tengah dan Povinsi terkait.

**C. PELAPORAN**

1. Laporan pelaksanaan rapat koordinasi program implementasi reformasi birokrasi OPD/Biro Setda Provinsi Jawa Tengah.
2. Laporan rapat pengumpulan dokumen bukti area perubahan reformasi birokrasi Prov. Jateng.
3. Laporan pelaksanaan rapat koordinasi persiapan evaluasi reformasi birokrasi/PMPRB Provinsi Jawa Tengah.
4. Laporan hasil monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
5. Laporan hasil konsultasi reformasi birokrasi ke Pusat dan study orientasi ke Provinsi lain.

**D. PENUTUP**

Demikian *Term of Reference* (TOR) atau kerangka acuan kerja sebagai acuan kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah. Secara lebih detail dijabarkan dalam *schedule* dan Matrik *Action Plan* sebagaimana terlampir.

Semarang, Mei 2018  
KEPALA BIRO ORGANISASI

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661016 199203 2 006